



## **BUPATI PROBOLINGGO**

---

### **PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 46 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**BATAS PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Pengajuan Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015 ;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran, adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Pembantu Bendahara Pengeluaran, adalah orang yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan dan melaksanakan fungsi sebagai kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang atau Pengurusan Gaji.
10. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP, adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
12. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
14. Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
15. Pengguna Anggaran, adalah pejabat pemegang wewenang pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

16. Kuasa Pengguna Anggaran, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

## BAB II

### UANG PERSEDIAAN

#### Pasal 2

- (1) SKPD dapat diberikan UP sekali dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) UP diberikan kepada Bendahara SKPD untuk dikelola sebagai uang muka kerja.
- (4) Penggunaan UP dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (5) UP disimpan pada rekening kas daerah atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (6) Selain disimpan pada rekening kas daerah, Bendahara Pengeluaran dapat menyimpan UP dalam brankas paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (7) Sisa UP pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas daerah paling lambat akhir Desember Tahun Anggaran berkenaan.

## BAB III

### PENGGUNAAN DANA UANG PERSEDIAAN

#### Pasal 3

UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa serta Belanja Tidak Langsung dan harus dipertanggungjawabkan.

## BAB IV

### GANTI UANG PERSEDIAAN

#### Pasal 4

Penggantian UP dapat dilakukan dengan mengajukan SPM-GU setelah laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran atas Pengajuan Dana SPM UP sebelumnya yang sudah disahkan.

BAB V

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (2) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambah uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (3) Ketentuan batas waktu penyeteroran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk :
  - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan ;
  - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 18 Desember 2014

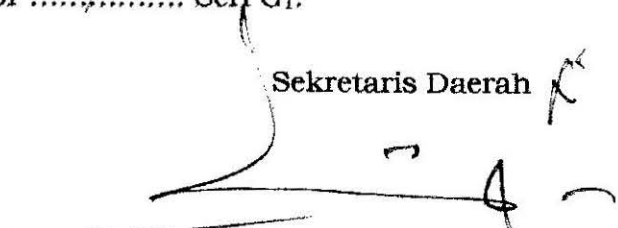
**BUPATI PROBOLINGGO**



**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014  
tanggal 19 Desember 2014 Nomor 46 Seri G1.

Sekretaris Daerah



**H. M. NAWI, SH. M. Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590527 198503 1 019



**JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBLINGGO TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	PLAFON ANGGARAN BELANJA			JUMLAH (BELANJA HIBAH, BANSOS, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA	BESARNYA UANG PERSEDIAAN
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH (BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG/JASA)		
1	2	3	4	5 = (3 + 4)	6	7
1	Dinas Pendidikan	635,375,000	25,759,601,442	26,394,976,442	-	700,000,000
2	Dinas Kesehatan	3,894,150,000	53,812,129,847	57,706,279,847	-	700,000,000
3	RSUD Waluyoati Kraksaan ( SKPD )	3,356,250,000	3,561,520,000	6,917,770,000	-	550,000,000
4	RSUD Tongas (SKPD )	979,800,000	1,848,715,000	2,828,515,000	-	250,000,000
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	741,465,000	7,452,963,881	8,194,428,881	-	650,000,000
6	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	807,665,000	5,795,376,000	6,603,041,000	-	550,000,000
7	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	1,033,512,500	33,851,331,500	34,884,844,000	-	650,000,000
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	835,170,000	6,921,236,500	7,756,406,500	-	650,000,000
9	Dinas Perhubungan	1,393,810,000	3,724,970,850	5,118,780,850	-	500,000,000
10	Badan Lingkungan Hidup	1,135,150,000	30,654,385,000	31,789,535,000	-	700,000,000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	600,145,000	3,839,175,000	4,439,320,000	-	400,000,000
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	380,325,000	4,088,452,000	4,468,777,000	-	400,000,000
13	Dinas Sosial	543,455,000	7,107,845,000	7,651,300,000	-	650,000,000
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	375,875,000	2,427,360,000	2,803,235,000	-	250,000,000
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	708,600,000	6,494,480,000	7,203,080,000	-	650,000,000
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	337,200,000	5,740,557,000	6,077,757,000	-	550,000,000
17	Kantor Penanaman Modal dan Perijinan	352,200,000	2,303,300,000	2,655,500,000	-	250,000,000
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	369,275,000	3,532,385,000	3,901,660,000	-	300,000,000
19	Kantor Pemuda dan Olah Raga	314,075,000	3,350,200,000	3,664,275,000	-	300,000,000
20	Perlindungan Masyarakat	478,450,000	3,176,968,000	3,655,418,000	-	300,000,000
21	Satuan Polisi Pamong Praja	1,109,900,000	2,797,950,000	3,907,850,000	-	300,000,000
22	Bagian Pemerintahan	107,050,000	2,560,370,000	2,667,420,000	-	250,000,000
23	Bagian Hukum	144,950,000	1,798,374,000	1,943,324,000	-	200,000,000
24	Bagian Organisasi	115,600,000	2,344,150,000	2,459,750,000	-	250,000,000
25	Bagian Penyusunan Program	298,250,000	1,584,850,000	1,883,100,000	-	200,000,000
26	Bagian Komunikasi dan Informasi	164,700,000	3,203,212,200	3,367,912,200	-	300,000,000
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat	218,375,000	4,413,125,000	4,631,500,000	-	400,000,000
28	Bagian Umum	1,223,075,000	15,532,875,000	16,755,950,000	-	700,000,000
29	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	88,100,000	2,903,215,000	2,991,315,000	-	250,000,000
30	Bagian Pengelolaan dan Pengadaan	511,250,000	5,147,350,000	5,658,600,000	-	500,000,000
31	Sekretariat DPRD	533,100,000	16,816,900,000	17,350,000,000	-	700,000,000
32	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	1,057,110,000	6,115,249,800	7,172,359,800	-	650,000,000
33	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	-	-	-	232,866,048,389	300,000,000
34	Dinas Pendapatan	1,061,500,000	6,109,050,000	7,170,550,000	-	650,000,000
35	Inspektorat	555,260,000	3,165,139,000	3,720,399,000	-	300,000,000
36	Badan Kepegawaian Daerah	722,580,000	6,242,002,900	6,964,582,900	-	550,000,000
37	Kecamatan Dringu	135,350,000	259,900,000	395,250,000	-	50,000,000
38	Kecamatan Kraksaan	202,500,000	360,000,000	562,500,000	-	75,000,000
39	Kecamatan Gading	117,450,000	317,750,000	435,200,000	-	50,000,000
40	Kecamatan Lumbang	155,450,000	280,550,000	436,000,000	-	50,000,000
41	Kecamatan Tiris	94,500,000	308,500,000	403,000,000	-	50,000,000
42	Kecamatan Besuk	215,040,000	274,760,000	489,800,000	-	50,000,000
43	Kecamatan Gending	68,650,000	337,750,000	406,400,000	-	50,000,000
44	Kecamatan Krejengan	148,100,000	301,900,000	450,000,000	-	50,000,000
45	Kecamatan Pajajaran	135,770,000	277,230,000	413,000,000	-	50,000,000
46	Kecamatan Sumber	63,000,000	330,250,000	393,250,000	-	50,000,000
47	Kecamatan Krucil	112,820,000	325,980,000	438,800,000	-	50,000,000
48	Kecamatan Tongas	129,700,000	310,800,000	440,500,000	-	50,000,000

1	2	3	4	5 = (3 + 4)	6	7
49	Kecamatan Tegalsiwalan	137,100,000	291,800,000	428,900,000	-	50,000,000
50	Kecamatan Wonomerto	205,770,000	255,810,000	461,580,000	-	50,000,000
51	Kecamatan Leces	178,750,000	283,600,000	462,350,000	-	50,000,000
52	Kecamatan Sukapura	128,450,000	264,135,000	392,585,000	-	50,000,000
53	Kecamatan Maron	76,620,000	310,246,750	386,866,750	-	50,000,000
54	Kecamatan Banyuanyar	76,620,000	310,246,750	386,866,750	-	50,000,000
55	Kecamatan Kotaanyar	155,545,000	311,875,000	467,420,000	-	50,000,000
56	Kecamatan Sumberasih	202,300,000	312,600,000	514,900,000	-	75,000,000
57	Kecamatan Kuripan	105,400,000	318,621,100	424,021,100	-	50,000,000
58	Kecamatan Bantaran	134,150,000	295,850,000	430,000,000	-	50,000,000
59	Kecamatan Paiton	134,150,000	295,850,000	430,000,000	-	50,000,000
60	Kecamatan Pakuniran	125,650,000	306,350,000	432,000,000	-	50,000,000
61	Kelurahan Semampir	63,950,000	157,600,000	221,550,000	-	20,000,000
62	Kelurahan Patokan	51,350,000	173,650,000	225,000,000	-	20,000,000
63	Kelurahan Sidomukti	23,900,000	136,970,000	160,870,000	-	20,000,000
64	Kelurahan Kraksaan Wetan	37,300,000	142,810,000	180,110,000	-	20,000,000
65	Kelurahan Kandangjati Kulon	27,800,000	131,581,198	159,381,198	-	20,000,000
66	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian	425,680,000	3,201,416,960	3,627,096,960	-	300,000,000
67	Badan Pemberdayaan Masyarakat	434,850,000	8,768,900,000	9,203,750,000	-	700,000,000
68	Kantor Arsip Daerah	158,400,000	1,452,400,000	1,610,800,000	-	200,000,000
69	Kantor Perpustakaan Umum Daerah	290,285,000	1,878,947,500	2,169,232,500	-	250,000,000
70	Dinas Pertanian	408,300,000	7,530,384,000	7,938,684,000	-	650,000,000
71	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	455,245,000	6,448,358,000	6,903,603,000	-	550,000,000
72	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	186,700,000	8,681,558,000	8,868,258,000	-	700,000,000
73	Dinas Perikanan dan Kelautan	322,950,000	9,383,573,000	9,706,523,000	-	700,000,000
74	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	406,050,000	6,774,030,000	7,180,080,000	-	650,000,000
	<b>Jumlah</b>	<b>33,714,342,500</b>	<b>358,281,298,178</b>	<b>391,995,640,678</b>	<b>232,866,048,389</b>	<b>22,500,000,000</b>

**BUPATI PROBOLINGGO**



**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**